



LAPORAN ANALISIS CAPAIAN  
**MANAJEMEN PERUBAHAN**  
B E R B A S I S R I S I K O



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
2022

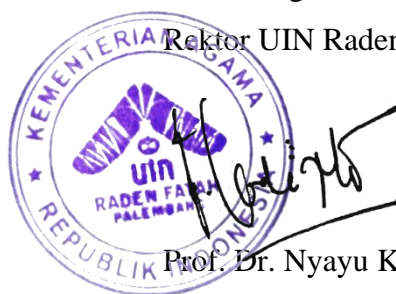
## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Allah yang maha kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen monitoring manajemen perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN Raden Fatah Palembang telah selesai disusun. Dokumen Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah serta acuan bagi segenap civitas akademika dan stakeholder UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pendidikan Tinggi, merupakan hal yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, yang dilahirkan dari perguruan tinggi yang memiliki kultur kerja yang berintegritas, wilayah yang bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tersusunnya dokumen rencana kerja ini merupakan hasil dari Tim yang telah ditunjuk oleh rektor UIN Raden Fatah Palembang melalui dekan Fakultas Psikologi untuk menghimpun berbagai konsep, teori dan berbagai regulasi yang terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani untuk dijadikan acuan dalam menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas. Atas upayanya tersebut kami sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang amat dalam. Kami menyadari bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian kami bertekad untuk senantiasa berusaha memperbaiki setiap kelemahan yang ada secara berkelanjutan. Kami harapkan kritik dan saran demi perbaikan dokumen rencana kerja ini.

Palembang, Desember 2022

Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	4
B. Dasar Hukum.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Ruang Lingkup.....	5
BAB II PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	
A. Manajemen Perubahan .....	6
B. Tata Laksana .....	6
C. Penataan Manajemen SDM.....	6
D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.....	7
E. Penguatan Pengawasan .....	7
F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	8
G. Komponen Hasil.....	8
BAB III HASIL MONITORING DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil .....	9
B. Analisis.....	10
C. Manajemen Risiko.....	11
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	12
B. Saran.....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melaksanakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi UIN Raden Fatah Palembang yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas di lingkungan instansi pemerintah. Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Dalam rangka membangun Zona Integritas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, maka perlu dilakukan langkah-langkah praktis antara lain (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun rencana kerja pembangunan zona integritas pada unit kerja UIN Raden Fatah Palembang sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika khususnya dan UIN Raden Fatah Palembang umumnya maupun stakeholder lainnya dalam melakukan berbagai kegiatan menuju Wilayah Bebas Korupsi, dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama

## **C. Tujuan**

1. Fungsi dari laporan ini adalah sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

## **D. Ruang Lingkup**

Untuk lebih mempercepat tercapainya program Reformasi Birokrasi itu secara efektif dan terarah, maka perlu secara konkret diprogramkan suatu strategi pencapaian target reformasi birokrasi tersebut melalui implementasi program pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), yang meliputi:

1. Penerapan program manajemen perubahan;
2. Penataan tata laksana;
3. Penataan manajemen SDM;
4. Penguatan pengawasan;
5. Penguatan akuntabilitas kinerja; dan
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **BAB II**

### **PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

#### **A. Manajemen Perubahan**

Indikator:

1. Penyusunan Tim Kerja;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM, dan
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.

Target

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai UIN Raden Fatah Palembang dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada seluruh pegawai UIN Raden Fatah Palembang sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK / WBBM,
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistansi terhadap perubahan.

#### **B. Tatalaksana**

Indikator:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama;
2. E-Office, dan
3. Keterbukaan Informasi Publik.

Target:

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK / WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK / WBBM.

#### **C. Penataan Sistem Manajemen SDM**

Indikator:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2. Pola mutasi internal;

3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
4. Penetapan kinerja individu;
5. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai, dan
6. Sistem informasi kepegawaian.

Target:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur pada pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan
5. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur pada pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

#### **D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Indikator:

1. Keterlibatan pimpinan, dan
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Target:

1. Meningkatkan kinerja pada UIN Raden Fatah Palembang, dan
2. Meningkatkan AKIP pada UIN Raden Fatah Palembang.

#### **E. Penguatan Pengawasan**

Indikator:

1. Pengendalian gratifikasi;
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
3. Pengaduan masyarakat;
4. Whistle Blowing System, dan
5. Penanganan bneturan kepentingan

Target:

1. Meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara pada UIN Raden Fatah Palembang;
2. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan pada UIN Raden Fatah Palembang, dan
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada UIN Raden Fatah Palembang

## **F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Indikator:

1. Standar Pelayanan;
2. Budaya pelayanan PRIMA, dan
3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Target:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) pada UIN Raden Fatah Palembang;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standardisasi pelayanan UIN Raden Fatah Palembang, dan
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

## **G. Komponen Hasil**

Indikator:

1. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti
3. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Target:

1. Meningkatnya Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
2. Meningkatnya temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti
3. Meningkatnya Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)



## BAB III HASIL DAN ANALISIS

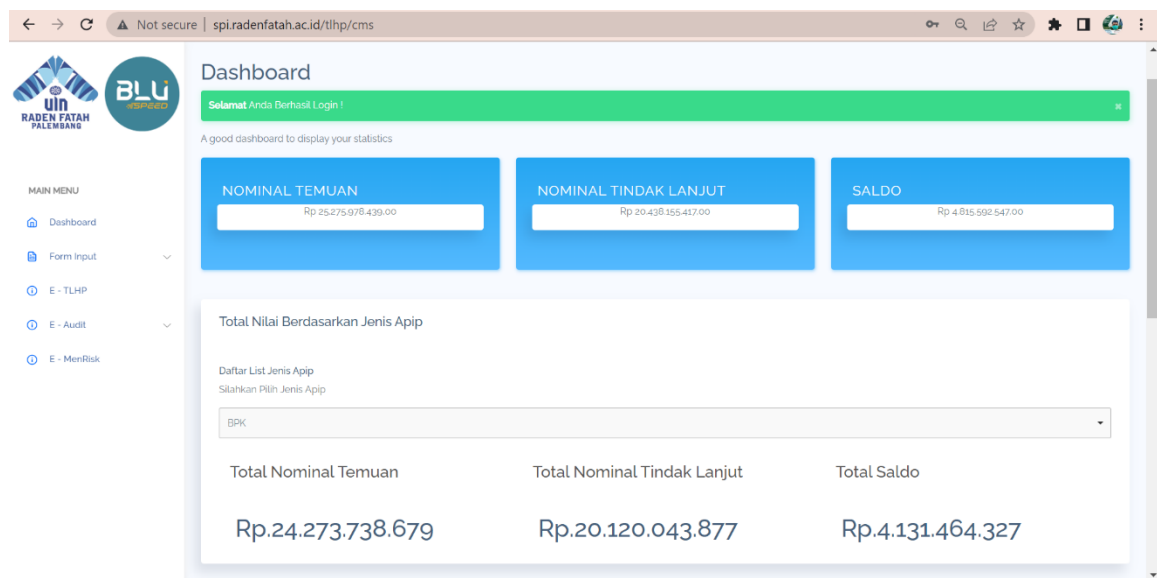
### A. Hasil



## B. Analisis

Indeks Capaian Aspek Pemenuhan (30) sebesar 85,13% dengan rincian Manajemen Perubahan sebesar 86,72%, Penataan Tatalaksana sebesar 83,33%, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 91,44%, Penguatan Akuntabilitas 74,71%, Penguatan Pengawasan 81,7%, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 94,35%. Indeks Capaian Aspek Pemenuhan (30) sebesar 68,76% dengan rincian Manajemen Perubahan sebesar 62,29%, Penataan Tatalaksana sebesar 76,24%, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 60%, Penguatan Akuntabilitas 90,1 %, Penguatan Pengawasan 56,19%, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 75%. Adapun Indeks Capaian Komponen Hasil sebesar 53,13% dengan detail Birokrasi Bersih Akuntabel 16,67% dan Pelayanan Publik Prima 100%. Kesimpulan Penilaian Indeks PMPZI UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 adalah 67,42.

**Analisis yang sangat penting bahwa nilai Komponen Birokrasi Bersih Akuntabel rendah, yaitu 16,67%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya temuan dari APIP yang belum terselesaikan. Sehingga UIN Raden Fatah berupaya membuat aplikasi e-pengawasan guna mengontrol penyelesaian TLHP.** Adapun Dashboard tersebut sebagai berikut:



<http://spi.radenfatah.ac.id/tlhp/>

Salah satu indikator keberhasilan UIN Raden Fatah Palembang, dalam menjalankan program pembangunan Zona Integritas dapat dilihat terimplementasikannya nilai-nilai Integritas dalam pelaksanaan program maupun perilaku sehari-hari dari pimpinan, pegawai maupun seluruh mahasiswa di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Pencapaian indikator tersebut dapat diraih melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat utuh dalam sistem akuntabilitas kinerja UIN Raden Fatah Palembang. Pengendalian rencana kerja pembangunan Zona Integritas UIN Raden Fatah Palembang, merupakan sebuah upaya sistematis untuk menghindari penyimpangan. Pengendalian ini memadukan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dengan tanggung jawab seluruh pegawai.

Standar prosedur pelayanan yang jelas dan tanggung jawab yang baik dari seluruh pegawai UIN Raden Fatah Palembang, akan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengawasi unit kerja dan bawahannya. Proses monitoring terhadap proses pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta, data, dan informasi dalam upaya pencapaian tujuan. Monitoring menghendaki pimpinan untuk secara langsung melihat proses yang terjadi, dengan dukungan dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor. Hal ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses monitoring. Data dan fakta tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dikerjakan, program yang disiapkan, sampai pada rencana yang sudah dibuat.

Fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di UIN Raden Fatah Palembang diarahkan kepada:

1. Memperkuat rasa tanggung jawab bagi pimpinan di direktorat, fakultas, jurusan, maupun program studi yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas
2. Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas agar sesuai dengan prosedur dan rencana kerja yang telah ditentukan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, kelainan, dan kelemahan yang menyebabkan kerugian
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak mengalami hambatan

5. Evaluasi yang dilakukan merupakan alat untuk dapat mengukur kemajuan dan pencapaian-pencapaian target kinerja pembangunan zona integritas maupun tujuan organisasi.
6. Evaluasi digunakan sebagai alat untuk membuat perencanaan kembali yang baik, sehingga keberlangsungan organisasi dapat dipertahankan, serta memastikan mana yang baik dan mana yang kurang baik sehingga memperjelas perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

### C. Manajemen Perubahan berbasis Manajemen Risiko

Laporan analisis dalam laporan ini telah disesuaikan dengan manajemen risiko. Hal tersebut termuat dalam Kertas Kerja Risk Register Satuan Pengawasan Internal tentang Tindak Lanjut Hasil Temuan sebagai berikut:

Kode Risiko	No.	Status Risiko	Peluang atau Ancaman	Kategori Risiko	Unit Kerja / Fungsi	Sasaran	Periode Identifikasi Risiko	Deskripsi atau Kejadian Risiko
SPI-R-01	1	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional	Mewujudkan Penerapan Manajemen Risiko yang baik	Semester Ganjil 2022/2023	Pengaduan pada WBS sangat minim
SPI-R-02	2	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional	Meningkatkan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Semester Ganjil 2022/2023	Pemeriksaan terhadap Kinerja di setiap Unit tidak berjalan optimal
SPI-R-03	3	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional	Meningkatkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Semester Ganjil 2022/2023	Pengisian Laporan Kinerja Pegawai (LKP) hanya sebatas formalitas sehingga tidak berpengaruh terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
SPI-R-04	4	Active	Threat	Finance Risk	SDM	Mewujudkan tata kelola (Good Governance) pengelolaan aset yang baik	Semester Ganjil 2022/2023	Unit Bisnis tidak dikelola secara profesional
SPI-R-05	5	Active	Threat	Finance Risk	Keuangan	Meningkatkan Pendapatan BLU melalui Diversifikasi Investasi	Semester Ganjil 2022/2023	Hasil Pengelolaan Aset Lancar tidak maksimal
SPI-R-06	6	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional	Ditindaklanjutinya Pemeriksaan Internal dan eksternal	Semester Ganjil 2022/2023	Tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal
SPI-R-07	7	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional	Tercapainya nilai minimum	Semester Ganjil 2022/2023	Tidak tercapainya Nilai PMRB, SPIP, SAKIP, dan BMN

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Indeks Capaian Aspek Pemenuhan (30) sebesar 85,13% dengan rincian Manajemen Perubahan sebesar 86,72%, Penataan Tatalaksana sebesar 83,33%, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 91,44%, Penguatan Akuntabilitas 74,71%, Penguatan Pengawasan 81,7%, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 94,35%. Indeks Capaian Aspek Pemenuhan (30) sebesar 68,76% dengan rincian Manajemen Perubahan sebesar 62,29%, Penataan Tatalaksana sebesar 76,24%, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 60%, Penguatan Akuntabilitas 90,1 %, Penguatan Pengawasan 56,19%, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 75%. Adapun Indeks Capaian Komponen Hasil sebesar 53,13% dengan detail Birokrasi Bersih Akuntabel 16,67% dan Pelayanan Publik Prima 100%. Kesimpulan Penilaian Indeks PMPZI UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 adalah 67,42. UIN Raden Fatah Palembang sebagai salah satu satuan kerja di Kementerian Agama yang ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit dalam lingkup zona integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

#### **B. Saran**

Program kerja yang tersusun dalam dokumen rencana kerja ini bersifat dinamis, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang termuat didalamnya masih dapat diubah dan dikembangkan sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat dikembangkan sehingga semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 30 Desember 2022

Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.

Semester Genap 2021/2022

**Nama Institusi :FITK UIN RF**

<b>Kode Risiko</b>	<b>No.</b>	<b>Status Risiko</b>	<b>Peluang atau Ancaman</b>	<b>Kategori Risiko</b>	<b>Unit Kerja / Fungsi</b>
SPI-R-01	1	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional
SPI-R-02	2	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional
SPI-R-03	3	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional
SPI-R-04	4	Active	Threat	Finance Risk	SDM
SPI-R-05	5	Active	Threat	Finance Risk	Keuangan
SPI-R-06	6	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional
SPI-R-07	7	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional

Sasaran	Periode Identifikasi Risiko	Deskripsi atau Kejadian Risiko
Mewujudkan Penerapan Manajemen Risiko yang baik	Semester Ganjil 2022/2023	Pengaduan pada WBS sangat minim
Meningkatkan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Semester Ganjil 2022/2023	Pemeriksaan terhadap Kinerja di setiap Unit tidak berjalan optimal
Meningkatkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Semester Ganjil 2022/2023	Pengisian Laporan Kinerja Pegawai (LKP) hanya sebatas formalitas sehingga tidak berpengaruh terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Mewujudkan tata kelola (Good Governance) pengelolaan aset yang baik	Semester Ganjil 2022/2023	Unit Bisnis tidak dikelola secara profesional
Meningkatkan Pendapatan BLU melalui Diversifikasi Investasi	Semester Ganjil 2022/2023	Hasil Pengelolaan Aset Lancar tidak maksimal
Ditindaklanjutinya Pemeriksaan Internal dan eksternal	Semester Ganjil 2022/2023	Tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan Ekternal dan Internal
Tercapainya nilai minimum	Semester Ganjil 2022/2023	Tidak tercapainya Nilai PMRB, SPIP, SAKIP, dan BMN

## IDENTIFIKASI RISIKO

Akar Penyebab	Indikator Risiko
<p>1. Instrumen WBS masih sangat sederhana dan rentan terjadi gangguan</p> <p>2. Tidak adanya sosialisasi terhadap Layanan WBS di setiap unit kerja</p>	<p>1. Akses Layanan Pengaduan sering terputus</p> <p>2. Sebagian besar Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang belum mengetahui dan memahai Layanan WBS.</p>
<p>Kurangnya auditor internal bidang non akademik (keuangan, akuntansi, manajemen risiko, hukum) sehingga menyebabkan pemeriksaan kinerja tidak dilakukan secara menyeluruh (random) setiap tahunnya</p>	<p>Hasil Control Self Assesment oleh Audit Internal tidak selaras/berbeda dengan hasil yang dikeluarkan Audit Eksternal</p>
<p>1. Pegawai tidak diwajibkan mengisi laporan kinerja melalui E-LKP di setiap akhir hari (harian) sehingga dapat diisi sekaligus di akhir bulan atau awal bulan berikut (bulanan) dengan sistem kebut semalam</p> <p>2. Besar kecilnya capaian akhir Kinerja bawahan dapat mempengaruhi kinerja atasan.</p>	<p>1. Adanya kasus perjokian dalam pengisian Laporan Kinerja Pegawai (E-LKP)</p> <p>2. Supervisor/Atasan Pegawai yang mengisi E-LKP kurang memperhatikan kesesuaian antara kinerja yang sebenarnya dan laporan di sistem E-LKP karena akan berdampak pada capaian akhir kinerja atasan.</p>
<p>1. tidak ada rencana bisnis yang strategi dan prospek</p> <p>2. Pimpinan Unit Pusat Bisnis berasal dari Dosen dengan Tugas Tambahan, tidak berlatar belakang praktisi bisnis.</p>	<p>1. laba yang dihasilkan kecil.</p> <p>2. Kurangnya peninjauan kerjasama dengan mitra dalam mengelola aset tetap seperti gedung AC.</p>
<p>aset lancar hanya difokuskan pada investasi produk simpanan bank</p>	<p>pendapatan yang dihasilkan kecil</p>
<p>tidak adanya sistem pengendalian yang memadai dalam tindak lanjut hasil temuan</p>	<p>Adanya temuan sama berulang dari tahun ke tahun</p>
<p>1. tidak dilaksanakannya pengukuran indikator, 2. pengelolaan manajemen tidak didasarkan kepada indikator yang ada</p>	<p>Berkurangnya nilai kinerja UIN Raden fatah</p>



<b>Faktor Positif / Internal Control Yang Ada Saat Ini</b>	<b>Dampak Kualitatif</b>	<b>Probabilitas (P)</b>	<b>Dampak (I)</b>
Sudah ada pegawai khusus yang mengkoordinir layanan WBS (JFT Humas)	Bentuk indikasi pelanggaran hukum yang berhubungan dengan layanan dan operasional perguruan tinggi yang dilakukan oleh oknum tertentu tidak terdeteksi dengan maksimal sehingga berdampak pada buruknya pelayanan yang terjadi secara terus menerus dan dapat menjadi masif	2 = Kecil	3 = Sedang
Telah dilakukan upaya peningkatan/percepatan sertifikasi Auditor Internal	Bentuk indikasi pelanggaran hukum yang berhubungan dengan keuangan dan perencanaan yang dilakukan oleh oknum tertentu sulit terdeteksi dengan baik dikarenakan sistem auditing per unit hanya dilakukan secara random sehingga berdampak pada nilai maturitas SPIP.	3 = Sedang	4 = Berat
belum ada	1. Kinerja pegawai menjadi tidak maksimal 2. Pengeluaran BLU untuk pembayaran remunerasi pegawai menjadi lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan (terjadi kerugian finansial)	3 = Sedang	3 = Sedang
rapat rutin bulanan dengan Dewan Pengawas sebagai bentuk kontrol terhadap bisnis yang dijalankan.	1. unit usaha didirikan untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan selain uang kuliah mahasiswa tidak tercapai targetnya. 2. Menjadi beban universitas dalam pengembangan unit usaha.	2 = Kecil	3 = Sedang
Sudah ada rencana diversifikasi investasi ke dalam bentuk Sukuk	bagi hasil yang didapat tidak signifikan	2 = Kecil	2 = Ringan
terdapatnya komponen tindak lanjut hasil temuan di dalam IKU pimpinan	Temuan tidak bisa diclosed	4 = Besar	3 = Sedang
sudah terdapatnya Tim yang akan melakukan assesment	Adanya persepsi kinerja yang tidak baik dari kementerian tentang UIN Raden Fatah	2 = Kecil	3 = Sedang

Semester Ganjil 2022/2023

PEMI

**RISIKO INHERENT**

Skor Risiko Inherent (W)	Tingkat Risiko Inherent	Probabilitas Risiko Inherent Kualitatif (%)	Dampak Finansial Risiko Inherent (Rp)	Nilai Bersih Risiko Inherent	Pemilik Risiko	Jabatan Pemilik Risiko
6	MEDIUM RISK	20%	Rp0	Rp0	Deky Anwar	Ka SPI
12	HIGH RISK	25%	Rp0	Rp0	Deky Anwar	Ka SPI
9	HIGH RISK	25%	Rp0	Rp0	Deky Anwar	Ka SPI
6	MEDIUM RISK	15%	Rp1.700.000.000	Rp255.000.000	Deky Anwar	Ka SPI
4	MEDIUM RISK	15%	Rp1.200.000.000	Rp180.000.000	Deky Anwar	Ka SPI
12	HIGH RISK	60%	Rp30.000.000	Rp18.000.000	Deky Anwar	Ka SPI
6	MEDIUM RISK	20%	Rp0	Rp0	Deky Anwar	Ka SPI

LIK RISIKO		
No. HP Pemilik Risiko	E-mail Pemilik Risiko	Strategi
81318397806	<a href="mailto:dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id">dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id</a>	MITIGATE
81318397806	<a href="mailto:dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id">dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id</a>	MITIGATE
81318397806	<a href="mailto:dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id">dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id</a>	TRANSFER
81318397806	<a href="mailto:dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id">dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id</a>	TRANSFER
81318397806	<a href="mailto:dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id">dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id</a>	MITIGATE
81318397806	<a href="mailto:dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id">dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id</a>	MITIGATE
81318397806	<a href="mailto:dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id">dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id</a>	MITIGATE

## EVALUASI DAN RENCANA PENANGANAN RISIKO

Penanganan Risiko ( <i>Risk Treatment</i> )	Biaya Penanganan Risiko (Rp)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupgrade Instrumen Layanan WBS melalui kerja sama dengan Pustipd</li> <li>2. Membuat program sosialisasi terhadap Layanan WBS di setiap unit kerja</li> </ol>	
<p>Meningkatkan kompetensi SDM SPI dengan mengajukan program pelatihan auditor profesional pada setiap bidang non akademik (keuangan, akuntansi, manajemen risiko, hukum)</p>	Rp50.000.000
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pembaharuan sistem pengisian LKP menjadi harian sebagaimana yang telah dilakukan beberapa kementerian</li> <li>2. Mendorong Pembaharuan Format Penilaian/Generated E-LKP yang didasarkan pada capaian kualitas kinerja maksimal 76% (efisiensi waktu) dan inovasi tugas tambahan yang maksimal 24% dari total jam kerja setiap bulannya</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi penyusunan rencana bisnis yang strategis dan prospek</li> <li>2. Mengusulkan Kriteria Calon Pimpinan Unit Pusat Bisnis berlatar belakang praktisi bisnis/profesional</li> </ol>	
<p>Mengusulkan perencanaan diversifikasi investasi ke dalam bentuk Sukuk</p>	
<p>Melakukan pengendalian dan pengawasan TLHP secara berkala</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan self assesment sebelum dilakukan assesment oleh kementerian,</li> <li>2. Mendorong Tim yang sudah dibentuk untuk melaksanakan tugasnya dengan baik</li> </ol>	